

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan terkait Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Pariwisata Telaga Ngebel, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memegang peran yang strategis sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata di kawasan Telaga Ngebel. Pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Bidang Destinasi, Industri, dan Pariwisata memiliki mandat untuk menyiapkan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan destinasi, dan pengembangan industri pariwisata.

Perumusan kebijakan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo mengacu pada

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman arah pembangunan pariwisata daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan, telah dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan berbagai instansi, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun lembaga vertikal. Beberapa instansi yang berpartisipasi antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Perhutani, serta Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kegiatan ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya menyusun kebijakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata.

Dalam tiga tahun terakhir, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan berbagai kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang berfokus pada pembangunan serta penataan infrastruktur destinasi wisata. Salah satu program penting yang berhasil direalisasikan adalah pembangunan fasilitas air mancur menari (*water fountain*), pembangunan tribun area air mancur sebagai tempat duduk bagi wisatawan, serta program pendampingan ekosistem pariwisata di kawasan Telaga Ngebel. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah membawa dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata, yang tercermin melalui peningkatan jumlah pengunjung, tingkat kepuasan wisatawan yang lebih tinggi, serta pertumbuhan sarana

pendukung pariwisata seperti penginapan dan rumah makan di area sekitar Telaga Ngebel. Kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas telah berjalan dengan arah yang sesuai, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh dinas, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk meningkatkan kualitas produk lokal, seperti pembuatan produksi gula aren dan kopi pupus, dengan cara memperkenalkan inovasi kemasan modern dan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perkembangan digital. Hasil dari pemberdayaan tersebut terlihat melalui tumbuhnya berbagai usaha masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima, rumah makan, penginapan, hingga penyedia jasa wisata seperti penyewaan perahu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi lokal sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam sektor pariwisata.

Dari sisi tata kelola destinasi, pengelolaan kawasan Telaga Ngebel masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keterbatasan lahan parkir yang belum mampu menampung lonjakan wisatawan, terutama pada

musim liburan. Meskipun demikian, pengelolaan kebersihan kawasan wisata telah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Pada aspek pengembangan industri pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah aktif melaksanakan kegiatan promosi melalui berbagai media digital, seperti Instagram, situs website yang dikelola oleh DISBUDPARPORA, dan TikTok. Informasi mengenai potensi pariwisata daerah secara rutin diperbarui dan dipublikasikan untuk menarik minat wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital ini juga tampak pada keberhasilan Desa Wisata Pupus yang menjadi salah satu desa penunjang Telaga Ngebel dalam ajang *Festival Dewi Cemara 2025*. Desa tersebut berhasil meraih dua penghargaan, yaitu kategori *Virtual Tour Terbaik* dan *Virtual Tour Eksotis*. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kreativitas masyarakat sekaligus menunjukkan kolaborasi yang efektif antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan komunitas lokal dalam mengembangkan potensi wisata berbasis teknologi digital. Selain itu, Dinas juga berkolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam membantu pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin PIRT agar produk mereka dapat dipasarkan di luar daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata Telaga Ngebel

Faktor-faktor Faktor-faktor yang memengaruhi peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung mencakup antara lain partisipasi aktif pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan seperti festival dan bazar yang diselenggarakan di kawasan wisata Telaga Ngebel, serta pelaksanaan wisata edukatif sebagai bentuk inovasi untuk memperkenalkan potensi lokal kepada wisatawan. Selain itu, terdapat kolaborasi lintas sektor dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum, yang menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Selain itu pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan juga memperoleh pelatihan khusus untuk menjadi pemandu wisata (*tour guide*) agar mampu memberikan layanan yang informatif dan berkualitas kepada para pengunjung.

Namun demikian, terdapat pula beberapa faktor penghambat, salah satunya adalah belum tersedianya *Tourism Information Center* (TIC) sebagai pusat informasi resmi mengenai seluruh destinasi wisata di sekitar kawasan Telaga Ngebel. Selain itu, sistem pemesanan tiket

masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan layanan digital atau pembayaran non-tunai seperti QRIS. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan juga belum sepenuhnya optimal, kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih terbatas. Dari sisi anggaran, keterbatasan dana untuk perbaikan infrastruktur juga menjadi tantangan bagi dinas dalam melaksanakan program pengembangan secara maksimal. Di samping itu, beberapa pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam hal ruang usaha yang terbatas dan modal yang minim untuk mengembangkan produk mereka, sehingga belum semua potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah berupaya menjalankan perannya dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan industri wisata. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam aspek fasilitas, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran, arah pembangunan pariwisata yang dijalankan sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Ponorogo.

4.2 Saran

Berdasarkan berbagai hambatan yang teridentifikasi dalam hasil penelitian, peneliti menyusun sejumlah saran yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Pariwisata Telaga Ngebel, meliputi:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu memperhatikan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana di kawasan Telaga Ngebel, terutama dalam hal penataan lahan parkir dan fasilitas umum lainnya. Mengingat peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan setiap tahunnya, diperlukan perluasan lahan parkir dan pembangunan area transit yang mampu menampung lonjakan pengunjung pada musim liburan. Selain itu, penyediaan fasilitas publik seperti toilet umum, tempat istirahat, serta penerangan di area wisata perlu ditingkatkan untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
2. Untuk mengatasi keterbatasan informasi pariwisata yang masih belum optimal, perlu dibentuk *Tourism Information Center (TIC)* yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi wisata secara terpadu. TIC dapat menjadi sarana edukatif sekaligus promosi yang memberikan informasi lengkap mengenai destinasi wisata, produk lokal, jadwal kegiatan, serta layanan transportasi. Dengan keberadaan TIC, wisatawan dapat memperoleh akses informasi yang cepat, akurat, dan terarah, sehingga mampu meningkatkan pengalaman berwisata.

3. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu menerapkan sistem digitalisasi dalam layanan pariwisata. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem pemesanan tiket secara daring dan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Penerapan sistem digital ini akan memberikan kemudahan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata.
4. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendampingan perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan sosialisasi secara intensif mengenai manfaat jangka panjang dari kegiatan pelatihan dan pendampingan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaksanaan pelatihan dapat dijadwalkan secara fleksibel agar dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa mengganggu aktivitas ekonomi mereka.
5. Mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu mengoptimalkan sumber pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership*) yang saling menguntungkan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur wisata, promosi, dan event budaya

6. Pelaku UMKM merupakan komponen penting dalam ekosistem pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa kemudahan akses permodalan dan penyediaan ruang usaha yang representatif bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan Telaga Ngebel.